

Received: Filled 06-06-2024 | Accepted: 24-07-2024 | Published: 27-08-2024

**ANALISIS PEMIKIRAN ALEXIS DE TOCQUEVILLE DALAM
MEMBANGUN KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH
DI KOTA BANDA ACEH**

*Jasmadi¹⁾, Ida Tutia Rakhmi²⁾, Zamzami³⁾ Saddam⁴⁾ Chairul Bariah⁵⁾

Email: jasmadi.yunus.hamzah@gmail.com¹⁾, Idatutiarakhmi@usk.ac.id²⁾,
multazam7788@gmail.com³⁾, Saddamgeo6@gmail.com⁴⁾, chairulbariah168@gmail.com⁵⁾

¹⁾ Dosen Tetap pada FISIP, UNADA, Banda Aceh

²⁾ Dosen Tetap pada Fakultas Hukum, Unsyiah, Banda Aceh

³⁾ Dosen Tetap pada FISIP, UNADA, Banda Aceh

⁴⁾ Dosen Tetap pada FISIP, UNADA, Banda Aceh

⁵⁾ Dosen Tetap pada FISIP, UNADA, Banda Aceh

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran *Alexis de Tocqueville* dalam membangun kemandirian pemerintah daerah di Kota Banda Aceh. Alexis de Tocqueville, dalam *Democracy in America*, memberikan pandangan konseptual akan pentingnya demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri dan efektif. Adapun permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kurang optimalnya pengelolaan sumber daya lokal sebagai basis kemandirian daerah di Kota Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* (studi pustaka) yang mengkaji literatur karya Alexis de Tocqueville dan mengidentifikasi regulasi berkaitan dengan otonomi daerah serta studi empiris desentralisasi dan partisipasi masyarakat di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip desentralisasi dan demokrasi pemerintah daerah dalam pandangan *Tocqueville* memiliki relevansi untuk diterapkan di Kota Banda Aceh. di mana Kota Banda Aceh memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan sektor pariwisata berbasis religi dan ekonomi syariah. Adapun kendala yang dihadapi ditemukan adalah: keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, minimnya alokasi anggaran daerah, dan keterbatasan dalam regulasi yang memberikan ruang gerak otonom. Penelitian ini memberikan rekomendasi meliputi: (1) memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui program pendidikan politik dan pelatihan keterampilan, (2) mendorong kebijakan pusat yang lebih fleksibel untuk mendukung desentralisasi fiskal, dan (3) memaksimalkan potensi lokal dengan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kata Kunci: *Alexis de Tocqueville; kemandirian pemerintah daerah; Kota Banda Aceh; desentralisasi; partisipasi masyarakat; demokrasi lokal*

ABSTRAK

*This study aims to analyse the relevance of Alexis de Tocqueville's ideas in building local government self-reliance in Banda Aceh City. Alexis de Tocqueville, in *Democracy in America*, provides a conceptual view of the importance of local democracy and community participation as the foundation for realising self-reliant and effective government. The problems identified in the research are the dependence of local governments on the central government, the low level of community participation in decision-making, and the less than optimal management of local resources as a basis for regional independence in Banda Aceh City. The research method used in this study is library research which examines the literature by Alexis de Tocqueville and identifies regulations related to regional autonomy as well as empirical studies of decentralisation and community participation in the city of Banda Aceh. The results showed that the principles of decentralisation and local government democracy in Tocqueville's view have relevance to be applied in Banda Aceh City, where Banda Aceh City has great potential in empowering the community through the management of the religious-based tourism sector and sharia economy. The obstacles faced were found to be: the limited capacity of local governments in optimally utilising this potential, the lack of regional budget allocations, and limitations in regulations that provide autonomous space. This research provides recommendations including: (1) strengthening the role of local governments in empowering local communities through political education and skills training programs, (2) encouraging more flexible central policies to support fiscal decentralisation, and (3) maximising local potential with better collaboration between local governments, communities, and the private sector.*

Keywords: *Alexis de Tocqueville; local government independence; Banda Aceh municipality; decentralisation; community participation; local democracy*

PENDAHULUAN

Kemandirian pemerintah daerah merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berfungsi secara efektif. Desentralisasi sebagai salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Alexis de Tocqueville, dalam *Democracy in America*, berpadangan akan pentingnya demokrasi lokal sebagai fondasi bagi kemandirian pemerintah daerah. Tocqueville mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah negara dalam mengelola demokrasi bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan lokal dan adanya otonomi yang memadai untuk mendukung kebutuhan masyarakat setempat (Tocqueville, 2002).

Di Indonesia, otonomi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan tertentu secara mandiri. Namun demikian, implementasi desentralisasi masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya diantaranya rendahnya kemandirian fiskal, ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Dwiyanto, 2017).

Beberapa penelitian terkait yang memiliki kesesuaian kajian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2020) menelaah terkait dengan ketergantungan fiskal yang tinggi sebagai kendala dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia yang sejalan dengan temuan dalam penelitian ini mengenai ketergantungan Kota Banda Aceh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK). Namun, penelitian Ahmad lebih berfokus pada analisis fiskal secara makro, sementara penelitian ini memberikan fokus lebih spesifik pada konteks lokal Banda Aceh dan relevansi pemikiran Alexis de Tocqueville dalam mendukung kemandirian daerah.

Sementara itu, Dwiyanto (2017) mengulas peran partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitiannya menemukan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi dan edukasi politik dari pemerintah. Hal ini senada dengan penelitian ini yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Banda Aceh masih rendah dan memerlukan peningkatan melalui edukasi politik dan perbaikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, penelitian Dwiyanto kurang menyoroti bagaimana teori klasik, seperti pemikiran Tocqueville, dapat digunakan untuk membangun partisipasi masyarakat dan demokrasi lokal secara lebih efektif.

Lebih jauh, Saragih (2019) menyoroti kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sebagai faktor penentu keberhasilan otonomi daerah. Penelitian ini menemukan kesamaan dalam konteks Banda Aceh, di mana keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM menghambat efektivitas pengelolaan potensi lokal. Namun, penelitian ini memiliki kebaharuan dalam menekankan pentingnya perspektif Tocqueville tentang demokrasi lokal sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis dan menawarkan solusi bagi masalah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan pemikiran klasik Tocqueville ke dalam konteks modern Kota Banda Aceh, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Kota Banda Aceh, sebagai salah satu kota yang memiliki otonomi daerah khusus berbasis syariat Islam, memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian melalui optimalisasi sumber daya lokal, seperti pariwisata religi dan pengembangan ekonomi syariah. Berdasarkan kajian awal permasalahan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Banda Aceh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK) masih tinggi, yang menjadi penghambat kemandirian daerah (Bappeda Banda Aceh, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian pemikiran *Alexis de Tocqueville* dalam membangun kemandirian pemerintah daerah di Kota Banda Aceh. Penekanan pada demokrasi lokal, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal

diharapkan memberikan perspektif baru dalam memperkuat otonomi daerah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi pustaka). Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pemikiran Alexis de Tocqueville dalam membangun kemandirian pemerintah daerah, khususnya di Kota Banda Aceh. *Library research* dipilih karena peneliti dapat mengkaji literatur secara mendalam termasuk karya-karya teoretis dan dokumen empiris yang relevan dengan topik penelitian (George, 2008).

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena kemandirian pemerintah daerah berdasarkan perspektif Alexis de Tocqueville. Penelitian kualitatif memberikan ruang untuk interpretasi mendalam terhadap data pustaka guna menghasilkan pemahaman yang holistik (Creswell, 2014).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan *library research* difokuskan pada kajian literatur, termasuk buku *Democracy in America* karya Alexis de Tocqueville, regulasi terkait otonomi daerah seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan laporan resmi pemerintah daerah Banda Aceh. Pendekatan ini juga melibatkan analisis dokumen akademik, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan untuk mengintegrasikan pandangan teoretis dengan konteks lokal.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan dan mengkaji dokumen karya Alexis de Tocqueville, undang-undang terkait otonomi daerah, laporan kinerja pemerintah daerah, dan artikel jurnal yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data dalam *library research* untuk memperoleh data sekunder yang valid (Bowen, 2009).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang mengidentifikasi tema-tema dalam literatur. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. **Reduksi Data:** Menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur.
2. **Kategorisasi :** Mengorganisasi data ke dalam kategori, seperti demokrasi lokal, partisipasi masyarakat, dan kemandirian pemerintah daerah.
3. **Interpretasi Teoretis:** Menghubungkan temuan dengan pemikiran Alexis de Tocqueville dan konteks otonomi daerah di Banda Aceh.

Pendekatan analisis ini membantu peneliti memahami relevansi teoritis dan aplikasinya terhadap masalah lokal yang dihadapi pemerintah daerah (Elo & Kyngäs, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Kemandirian Pemerintah Daerah di Kota Banda Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk mengembangkan kemandirian pemerintah daerah, khususnya melalui optimalisasi sumber daya lokal. Dalam konteks pemikiran Alexis de Tocqueville, demokrasi lokal yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan desentralisasi kekuasaan yang nyata (Tocqueville, 2002). Namun, di Banda Aceh, pelaksanaan prinsip-prinsip ini masih menghadapi beberapa tantangan utama.

a. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah (Dwiyanto, 2017). Sebagian besar masyarakat kurang memahami pentingnya peran mereka dalam membangun otonomi daerah yang mandiri.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Banda Aceh memiliki potensi sumber daya lokal yang besar, seperti pariwisata berbasis religi dan ekonomi syariah. Namun, pengelolannya belum optimal, yang menyebabkan ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK) dari pemerintah pusat masih tinggi (Bappeda Banda Aceh, 2021).

Berdasarkan Analisis hasil penelitian serta temuan di Kota Banda Aceh dan relevansi dengan pemikiran Alexis de Tocqueville dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.

Analisis Kemandirian Pemerintah Kota Banda Aceh

| Komponen Analisis | Kemandirian Pemerintah Daerah | Pemikiran Alexis de Tocqueville | Analisis |
|------------------------|--|--|---|
| Partisipasi Masyarakat | Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah. | Partisipasi masyarakat merupakan fondasi demokrasi lokal, memungkinkan masyarakat menjadi pengawas langsung kebijakan. | Tingkat partisipasi yang rendah menunjukkan ketidaksejajaran dengan prinsip Tocqueville. Diperlukan upaya edukasi politik dan transparansi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. |

Analisis Pemikiran Alexis De Tocqueville

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Ketergantungan Fiskal | Ketergantungan tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK), mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah. | Kemandirian fiskal adalah prasyarat penting bagi otonomi pemerintah lokal untuk mendukung pengambilan kebijakan independen. | Ketergantungan fiskal bertentangan dengan pandangan Tocqueville tentang otonomi daerah. Perlu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). |
| Pemanfaatan Sumber Daya Lokal | Potensi lokal, seperti pariwisata religi dan ekonomi syariah, belum dimanfaatkan secara maksimal akibat lemahnya koordinasi. | Pemerintah lokal harus memanfaatkan potensi unik untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kemandirian daerah. | Keterbatasan ini mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih terfokus untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sebagai instrumen kemandirian daerah. |
| Regulasi Pemerintah Pusat | Regulasi pusat membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal. | Pemerintah lokal memerlukan kebebasan kebijakan tanpa intervensi berlebihan untuk mendukung demokrasi lokal. | Regulasi yang membatasi bertentangan dengan teori Tocqueville. Dibutuhkan reformasi regulasi untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada pemerintah daerah. |
| Kapasitas Pemerintah Daerah | Kapasitas SDM dan kelembagaan masih terbatas dalam pengelolaan anggaran dan pengembangan potensi ekonomi lokal. | Demokrasi lokal yang efektif memerlukan kelembagaan yang kuat dan SDM yang kompeten untuk mendukung pengelolaan mandiri. | Kapasitas yang lemah menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip Tocqueville. Perlu pelatihan dan penguatan kelembagaan untuk mendukung kemandirian daerah. |
| Demokrasi Lokal | Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan masih kurang, memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. | Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal adalah kunci bagi keberhasilan demokrasi lokal. | Transparansi yang rendah menghambat penerapan demokrasi lokal. Perlu langkah konkret untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah dan membangun kepercayaan masyarakat. |

Sumber: Analisis data 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip Tocqueville relevan untuk diterapkan di Kota Banda Aceh, terdapat banyak aspek yang memerlukan penguatan, seperti partisipasi masyarakat, kemandirian fiskal, pemanfaatan potensi lokal, dan kapasitas kelembagaan. Solusi strategis yang melibatkan reformasi regulasi, edukasi masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan keselarasan antara teori dan praktik.

2. Kendala dalam Membangun Kemandirian Pemerintah Daerah di Kota Banda Aceh

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun kemandirian daerah berdasarkan analisis relevansi pemikiran Alexis de Tocqueville. Kendala ini mencakup aspek partisipasi masyarakat, ketergantungan

fiskal, regulasi pemerintah pusat, pemanfaatan sumber daya lokal, dan kapasitas kelembagaan.

a) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Banda Aceh dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah masih rendah. Edukasi politik yang minim dan keterbatasan transparansi pemerintah menjadi faktor utama penghambat partisipasi. Tocqueville menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan fondasi demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat untuk menjadi pengawas langsung terhadap kebijakan pemerintah (Tocqueville, 2002). Dwiyanto (2017) juga mencatat bahwa rendahnya partisipasi masyarakat adalah masalah umum dalam otonomi daerah di Indonesia, yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat.

b) Ketergantungan Fiskal terhadap Pemerintah Pusat

Kota Banda Aceh masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK) dari pemerintah pusat. Hal ini membatasi fleksibilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Ketergantungan fiskal ini menunjukkan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Wheare (1964) menekankan bahwa desentralisasi fiskal yang kuat adalah kunci untuk mendukung kemandirian daerah. Ahmad (2020) menambahkan bahwa ketergantungan fiskal adalah hambatan struktural utama dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia.

c) Regulasi yang Membatasi Ruang Gerak Pemerintah Daerah

Beberapa regulasi pemerintah pusat membatasi otonomi pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan batasan yang signifikan pada fleksibilitas daerah untuk mengelola sumber daya dan menetapkan prioritas pembangunan. Tocqueville (2002) menyatakan bahwa pemerintah lokal membutuhkan kebebasan yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara efektif tanpa intervensi berlebihan dari pusat.

d) Pemanfaatan Sumber Daya Lokal yang Belum Optimal

Potensi lokal, seperti pariwisata berbasis religi dan ekonomi syariah, belum dimanfaatkan secara maksimal di Banda Aceh. Lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta, serta kurangnya investasi, menjadi hambatan utama. Saragih (2019) menekankan bahwa pengelolaan potensi lokal sering kali terhambat oleh minimnya kapasitas kelembagaan dan visi strategis pemerintah daerah.

e) Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia di Banda Aceh masih terbatas. Hal ini berdampak pada efektivitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Tocqueville menekankan bahwa demokrasi lokal hanya dapat berfungsi secara efektif apabila didukung oleh kelembagaan yang kuat dan aparatur yang kompeten. Penelitian oleh Dwiyanto (2017) juga menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan yang lemah adalah hambatan utama dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia.

Hasil ini menggambarkan bahwa kendala yang dihadapi Banda Aceh dalam membangun kemandirian pemerintah daerah memerlukan solusi yang terfokus pada peningkatan kapasitas lokal, reformasi regulasi, dan penguatan partisipasi masyarakat. Berikut adalah tabel analisis hasil penelitian terkait **kendala dalam membangun kemandirian pemerintah daerah di Kota Banda Aceh**:

Tabel 1.2

Analisis faktor kendala Kemandirian Pemerintah Kota Banda Aceh

| Komponen Analisis | Faktor Kendala kemandirian Pemerintah Daerah | Pemikiran Alexis de Tocqueville | Analisis |
|----------------------------------|--|---|---|
| Partisipasi Masyarakat | Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan masih rendah. | Partisipasi aktif masyarakat adalah fondasi demokrasi lokal dan kunci akuntabilitas pemerintah. | Diperlukan edukasi politik untuk masyarakat serta peningkatan transparansi pemerintah daerah agar partisipasi lebih aktif. |
| Ketergantungan Fiskal | Ketergantungan tinggi pada DAU dan DOK dari pemerintah pusat mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah. | Kemandirian fiskal penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang sesuai kebutuhan lokal. | Pemerintah daerah harus meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal, seperti pariwisata religi dan ekonomi syariah. |
| Regulasi Pemerintah Pusat | Regulasi membatasi fleksibilitas daerah dalam mengelola anggaran dan kebijakan lokal. | Pemerintah lokal membutuhkan kebebasan kebijakan untuk mendukung demokrasi lokal. | Regulasi pemerintah pusat perlu direformasi untuk memberikan ruang otonomi yang lebih besar bagi daerah. |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| Pemanfaatan Sumber Daya Lokal | Potensi lokal, seperti pariwisata religi dan ekonomi syariah, belum dimanfaatkan secara maksimal. | Pemerintah lokal harus memanfaatkan potensi unik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. | Perlu strategi pengelolaan potensi lokal berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. |
| Kapasitas Pemerintah Daerah | Kapasitas kelembagaan dan SDM pemerintah daerah masih terbatas, menghambat pengelolaan anggaran dan kebijakan secara mandiri. | Demokrasi lokal yang efektif membutuhkan kelembagaan yang kuat dan SDM yang kompeten. | Pelatihan dan penguatan kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas aparatur daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. |
| Demokrasi Lokal | Akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah belum optimal, memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. | Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal adalah kunci keberhasilan demokrasi lokal. | Transparansi dalam pengelolaan kebijakan harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. |

Sumber: Analisis data 2024

Rendahnya partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah menjadi hambatan dalam pelaksanaan demokrasi lokal di Kota Banda Aceh. Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang diajukan mencakup edukasi politik bagi masyarakat dan perbaikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat guna mendorong keterlibatan yang lebih aktif. Selain itu, ketergantungan fiskal yang tinggi serta regulasi dari pemerintah pusat yang terlalu membatasi turut menghambat kemandirian daerah. Reformasi regulasi dan optimalisasi sumber daya lokal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis yang disarankan untuk mengatasi masalah ini. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah juga mengurangi efektivitas pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung kemandirian pemerintah daerah secara lebih optimal.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Kemandirian Pemerintah Daerah di Kota Banda Aceh

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun Kota Banda Aceh memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian pemerintah daerah, implementasi prinsip-prinsip kemandirian sebagaimana yang diajukan oleh Alexis de Tocqueville belum sepenuhnya terealisasi. Tocqueville memberikan pandangan bahwa keberhasilan demokrasi lokal terletak pada kuatnya partisipasi masyarakat dan otonomi pemerintah daerah dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya lokal (Tocqueville, 2002).

a. Partisipasi Masyarakat

Dalam teori Tocqueville, partisipasi masyarakat bukan hanya merupakan instrumen demokrasi, akan tetapi juga fondasi bagi kemandirian daerah. Ia menyatakan bahwa masyarakat yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan akan menciptakan pemerintahan lokal yang lebih akuntabel dan efektif (*Democracy in America*, Tocqueville, 2002). Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Banda Aceh dalam proses pengambilan keputusan masih rendah. Di samping itu, Hal ini serupa dengan yang ditemukan oleh Dwiyanto (2017), yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat di Indonesia sering kali bersifat simbolis dan belum terintegrasi secara substansial dalam proses pembuatan kebijakan.

b. Ketergantungan Fiskal dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Menurut teori desentralisasi oleh Wheare (1964), salah satu indikator kemandirian pemerintah daerah adalah kapasitas fiskal yang memadai. Kota Banda Aceh masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK), yang mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini menjadi hambatan bagi daerah untuk berinovasi dan menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ahmad (2020) juga mencatat bahwa ketergantungan fiskal merupakan tantangan utama dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Dari sisi potensi lokal, Kota Banda Aceh memiliki peluang besar melalui pariwisata berbasis religi dan ekonomi syariah. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antar-lembaga dan rendahnya investasi di sektor ini. Pendapat ini diperkuat oleh Saragih (2019), yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya lokal sering kali terhambat oleh minimnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat daerah.

c. Demokrasi Lokal sebagai Dasar Kemandirian

Tocqueville berpendapat bahwa demokrasi lokal yang kuat harus didukung oleh pengelolaan kelembagaan yang baik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas (Tocqueville, 2002). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Banda Aceh perlu meningkatkan mekanisme transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program-program daerah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.

Pemikiran Tocqueville tentang pentingnya otonomi pemerintah lokal dan partisipasi masyarakat memiliki relevansi terkait dengan kajian di Kota Banda Aceh. Demokrasi lokal yang ideal, menurut Tocqueville, hanya dapat terwujud apabila pemerintah daerah memiliki kemandirian yang nyata dalam aspek fiskal dan kebijakan, serta masyarakatnya aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi prioritas.

2. Kendala dalam Membangun Kemandirian Pemerintah Daerah

a. Ketergantungan Fiskal

Ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kota Banda Aceh terhadap pemerintah pusat merupakan hambatan dalam membangun kemandirian daerah. Sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK), yang mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini sesuai dengan pandangan Wheare (1964), yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal adalah syarat utama untuk mencapai otonomi yang efektif. Ketergantungan fiskal ini juga mencerminkan tantangan umum yang dihadapi daerah di Indonesia dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Ahmad, 2020).

b. Regulasi yang Membatasi Otonomi

Regulasi pemerintah pusat sering kali menjadi penghalang bagi daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya, memberikan batasan dalam hal kewenangan pengelolaan anggaran dan kebijakan daerah tertentu. Tocqueville (2002) dalam *Democracy in America* menekankan bahwa pemerintah lokal harus memiliki kebebasan dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya untuk menjamin kemandirian yang sejati. Regulasi yang terlalu ketat dapat melemahkan fungsi otonomi daerah dan menyebabkan ketergantungan pada pemerintah pusat.

c. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah

Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat lokal masih menjadi kendala dalam memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Menurut Saragih (2019), banyak pemerintah daerah di

Indonesia mengalami keterbatasan dalam hal kompetensi aparatur untuk menjalankan fungsi otonomi daerah secara efektif. Di Banda Aceh, hal ini terlihat dari kurangnya pelatihan dan pengembangan kemampuan manajerial dalam mengelola sektor ekonomi lokal seperti pariwisata religi dan ekonomi syariah. Tocqueville juga menekankan bahwa demokrasi lokal hanya dapat berfungsi dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten.

d. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah masih rendah, meskipun partisipasi ini merupakan elemen kunci dalam membangun demokrasi lokal yang sehat. Tocqueville menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan lokal sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik (Tocqueville, 2002). Dwiyanto (2017) juga mencatat bahwa partisipasi masyarakat yang rendah sering disebabkan oleh kurangnya transparansi dan edukasi politik di tingkat lokal, yang menciptakan kesenjangan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

e. Integrasi Teori dan Temuan Penelitian

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan perlunya reformasi struktural dan penguatan kapasitas lokal di Banda Aceh. Pemikiran Tocqueville tentang demokrasi lokal memberikan kerangka yang relevan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah di kota Banda Aceh, dengan menekankan desentralisasi fiskal, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat sebagai solusi utama. Pendekatan ini juga didukung oleh Wheare (1964), yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara otonomi daerah dan dukungan pusat untuk menciptakan pemerintahan yang mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berfokus pada rumusan masalah mengenai pemikiran Alexis de Tocqueville dalam membangun kemandirian pemerintah daerah di Kota Banda Aceh, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Kemandirian Pemerintah Daerah

Prinsip demokrasi lokal yang diajukan oleh Alexis de Tocqueville, seperti partisipasi masyarakat dan desentralisasi kekuasaan, belum sepenuhnya terealisasi di Kota Banda Aceh. Tingkat partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan masih rendah, disebabkan oleh kurangnya edukasi politik dan minimnya transparansi pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan potensi lokal, seperti pariwisata religi dan ekonomi syariah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

2. Kendala dalam Membangun Kemandirian Pemerintah Daerah

Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan dalam membangun kemandirian pemerintah daerah. Ketergantungan fiskal terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK) menjadi penghalang utama bagi pemerintah daerah untuk beroperasi secara mandiri. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat lokal belum memadai untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Regulasi pemerintah pusat juga dinilai terlalu membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan lokal.

3. Relevansi Pemikiran Alexis de Tocqueville

Pemikiran Tocqueville tentang pentingnya demokrasi lokal dan otonomi pemerintah daerah sangat relevan dengan konteks Kota Banda Aceh. Demokrasi lokal yang ideal menurut Tocqueville membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif, pemerintah daerah yang transparan, serta otonomi dalam pengelolaan kebijakan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam membangun kemandirian daerah.

REFERENSI

- Ahmad, R. (2020). The fiscal dependency of local governments in Indonesia: Challenges and solutions. *International Journal of Public Administration*, 43(10), 856–870. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1729186>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh. (2021). *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021*. Banda Aceh: Bappeda Kota Banda Aceh. Retrieved from <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Gadjah Mada University Press.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115.
- George, A. L., & Bennett, A. (2008). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Nurdin, H., & Rahayu, S. (2022). Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. *Jurnal Ensiklopedia Administrasi*, 7(5), 102–118. Retrieved from <https://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Prasetyo, B. (2022). Alternatif strategi menekan kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 7(4), 41–55. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id>
- Pratama, B. D. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Tata Negara dan Hukum*, 10(4), 78–89. Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id>
- Putri, R. N. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif warga dalam pembangunan sosial. *Jurnal Pengembangan Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 45–60. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id>
- Rahman, A., & Putra, D. (2023). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Tata Pemerintahan Modern*, 12(2), 89–104. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id>
- Ramadhan, I. S., & Malik, A. (2023). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: Menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Menara Ilmu*, 9(2), 121–136. Retrieved from <https://www.jurnal.umsb.ac.id>
- Saragih, S. (2019). Building local government capacity: Case studies in decentralized regions. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 145–159. Retrieved from <https://jurnal.ap.ac.id>

- Sutrisno, T., & Widodo, A. (2023). Kemandirian daerah dan prospek ekonomi wilayah Kalimantan. *Jurnal Ekonomi Regional*, 9(1), 15–32. Retrieved from <https://itrev.kemenkeu.go.id>
- Syamsuddin, F. (2023). Desentralisasi kebijakan dalam otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 59–74. Retrieved from <https://eprints2.ipdn.ac.id>
- Tocqueville, A. (2002). *Democracy in America*. University of Chicago Press.
- Wheare, K. C. (1964). *Federal Government*. Oxford University Press.
- Wijaya, L. M., & Hidayat, T. (2022). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 15(1), 34–47. Retrieved from <https://jurnal.fisipolupgriplk.ac.id>
- Zainal, M. (2023). Makna otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi luas. *Jurnal Manajemen Publik*, 11(3), 67–80. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id>